



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS**

Tahun Sidang : 2024 – 2025
Masa Sidang : I
Rapat : Ke – 7
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
Sifat : Terbuka
Pukul : 13.20 WIB s.d 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara : 1. Membahas Evaluasi APBN TA 2024 s/d bulan Agustus 2024;
2. Membahas LKPP APBN TA.2023;
3. Membahas RKA K/L TA. 2025 Kemenhub dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2025.
Ketua Rapat : Roberth Rouw
Sekretaris : Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota : dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Menteri Perhubungan beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.20 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan hari ini adalah Membahas Evaluasi APBN TA 2024 s/d bulan Agustus 2024, Membahas LKPP APBN TA.2023, dan Membahas RKA K/L TA. 2025 Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2025.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian per 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

| KEMENTERIAN | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| Kementerian Perhubungan | 51,95% | 53,73% |

2. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang.
3. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan terhadap alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dalam RAPBN TA 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: S-612/MK.02/2024 dan B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga TA 2025 sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

| KEMENTERIAN | PAGU KEBUTUHAN | NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2025 | SELISIH |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | A | B | (A-B) |
| Kementerian Perhubungan | 80.638.966.701 | 24.765.974.503 | 55.872.992.198 |

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2025 di DPR RI.

4. Terkait dengan usulan penambahan anggaran untuk kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7,686 Triliun, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan usulan kenaikan anggaran tersebut sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2025 di DPR RI.
5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar:
 - a. menyesuaikan alokasi pagu anggaran TA 2025 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI dan akan dibahas secara lebih rinci dengan Unit Organisasi Eselon I pada rapat yang akan datang;

b. mengupayakan penambahan...../Hal.3

- b. mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk Program-program kemasyarakatan di RAPBN TA 2025;
- c. meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka penertiban bangunan-bangunan liar di bantaran rel kereta api dan meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap Sekolah Kedinasan dan Terminal Tipe A serta menyerahkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 29 Agustus 2024

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

KETUA RAPAT,

ttd

ROBERTH ROUW